

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.² Dapat dikatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu penyakit suatu negara, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi.³ Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang, dan kasus kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang kerap muncul di negara-negara yang sedang berkembang maupun negara miskin. Kemiskinan pada negara berkembang merupakan masalah yang cukup rumit meskipun beberapa negara berkembang telah berhasil melaksanakan pembangunan dalam hal produksi dan pendapatan nasional.

Menurut Haughton dan Shahidur, kemiskinan selalu berhubungan dengan ketimpangan, dan kerentanan karena orang yang tidak di anggap miskin bisa saja sewaktu-waktu menjadi miskin jika mengalami permasalahan misalkan krisis finansial, dan penurunan harga usaha pertanian. Kerentanan merupakan sebuah dimensi pokok kesejahteraan karena hal tersebut mempengaruhi tingkah laku setiap individu dalam hal investasi, pola produksi

² Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf, "Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau", *Jurnal Ekonomi*, Vol (22) No. 2, Juni 2014, hlm. 2

³ Slamet Priyo, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kab. Brebes Tahun 2009-2011", *Economics Development Analysis Journal*, Vol (3) No. 1, April 2014, hlm. 159-172

dan strategi yang sesuai serta persepsi tentang situasi masing-masing.⁴ Teori kemiskinan menurut Myrdal yang memiliki pemikiran serupa dimana lemahnya total tabungan di wilayah miskin menyebabkan minimnya investasi di wilayah itu yang kemudian menyebabkan rendahnya produktifitas wilayah dan kemudian berujung pada lemahnya pendapatan wilayah. Pendapatan wilayah yang lemah kemudian menyebabkan rendahnya tingkat tabungan wilayah dan terus mengikuti lingkaran setan semacam itu. Wilayah pedesaan adalah wilayah yang paling rentan mengalami lingkaran setan kemiskinan semacam itu.⁵

Kondisi kemiskinan suatu daerah juga merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada daerah tersebut salah satu contohnya yaitu Indonesia saat ini yang menjadikan permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang masih menjadi perhatian. Kemiskinan merupakan permasalahan yang belum berhasil dipecahkan secara menyeluruh, dalam pengertian tidak ada lagi manusia yang terposisikan dibawah standar hidup layak. Berbagai penyebab kemiskinan telah dirumuskan dari sifat manusia tertentu yang tidak mau atau tidak mampu berusaha sampai dengan adanya upaya struktural yang memang merupakan kesengajaan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, geografis, dan lokasi lingkungan. Hal ini serupa dengan teori yang disampaikan oleh Ragnar Nurkse yaitu teori lingkaran kemiskinan.

⁴ Haughton, Jonathan dan Shahidur R. Khandker, *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan (Handbook on Poverty and Inequality)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 3

⁵ Myrdal, Gunar. 1964. *Economic Theory and Underdeveloped Regions*. Allen and Unwin. London. hlm. 60

Ragnar Nurkse mengungkapkan bahwa adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menjadi penyebab produktivitas rendah sehingga pendapatan yang diterima juga rendah. Rendahnya pendapatan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya tabungan dan investasi ini menyebabkan keterbelakangan. Begitu seterusnya.⁶ Selain itu, Kartasmita juga menegaskan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan.⁷

Berbagai definisi yang telah diuraikan sebelumnya dapat dijelaskan bahwa fenomena kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan yang dialami individu, kelompok dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. Contohnya seperti pendidikan yang rendah, sehingga banyak yang menganggur dan tidak bekerja serta banyak warga yang belum mampu mengakses program maupun pelayanan pemerintah sehingga sulit memenuhi kebutuhannya.⁸

Saat ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai strategi dan kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan, namun masih jauh dari induk permasalahan atau dapat dikatakan bahwa strategi-strategi dan kebijakan yang dilaksanakan masih

⁶ Junjun Arip N, "Lingkaran Setan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya dan Gagasan Manajemen Zakat Produktif sebagai Solusi", *Jurnal Ekonomi Syariah La Zhulma*, Vol (1) No. 1 (Juni-Desember 2020), hlm. 61-98

⁷ Kartasmita, Ginanjar, *Pemberdayaan Masyarakat, Sebuah Tinjauan Administrasi, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi*, (Malang: Universitas Brawijaya, 1995), hlm. 34

⁸ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 2

belum dapat dikatakan berhasil secara maksimal. Terlebih baru-baru ini tingkat kemiskinan di berbagai negara yang terdampak Covid-19 telah mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini dinyatakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat angka kemiskinan di Indonesia selama pandemi Covid-19 bertambah sebesar 2,76 juta jiwa menjadi 27,55 juta jiwa. Begitupun Provinsi Jawa Timur, yang saat ini telah menempati posisi peringkat ketiga dimana proporsi penduduk kota sebesar 40.665.7 jiwa, dan dengan besarnya proporsi penduduk tingkat kemiskinan di Jawa Timur tentu saja akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi negara.

Berikut adalah data penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2021:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Ribu Jiwa)		
	2019	2020	2021
Pacitan	75.86	80.82	84.19
Ponorogo	83.97	86.74	89.94
Trenggalek	76.44	81.06	84.89
Tulungagung	70.01	76.40	78.59
Blitar	103.75	108.55	112.62
Kediri	163.95	179.93	184.49
Malang	246.60	265.56	276.58
Lumajang	98.88	102.60	105.25
Jember	226.57	247.99	257.09
Banyuwangi	121.37	130.37	130.93
Bondowoso	103.33	110.24	115.18
Situbondo	76.44	83.74	86.95
Probolinggo	207.22	218.35	223.32
Pasuruan	141.09	151.43	159.78

Lanjutan Tabel 1.1

Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Ribuan Jiwa)		
	2019	2020	2021
Sidoarjo	119.29	127.05	137.15
Mojokerto	108.81	118.80	120.54
Jombang	116.44	125.94	127.30
Nganjuk	118.51	122.73	125.53
Madiun	71.91	78.30	81.61
Magetan	60.43	65.09	67.75
Ngawi	119.43	128.19	130.81
Bojonegoro	154.64	161.10	166.52
Tuban	170.80	187.13	192.58
Lamongan	157.11	164.68	166.82
Gresik	148.61	164.05	166.35
Bangkalan	186.11	204.00	215.97
Sampang	202.21	224.74	237.23
Pamekasan	122.43	129.41	137.12
Sumenep	211.98	220.23	224.73
Kota Kediri	20.54	22.19	22.55
Kota Blitar	10.10	11.10	11.33
Kota Malang	35.39	38.77	40.62
Kota Probolinggo	16.37	17.72	17.91
Kota Pasuruan	12.92	13.40	13.97
Kota Mojokerto	6.63	8.09	8.37
Kota Madiun	7.69	8.83	9.06
Kota Surabaya	130.55	145.67	152.49
Kota Batu	7.89	8.12	8.63
Jawa Timur	4112.25	4419.10	4572.73

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2022

Dari Tabel 1.1 dapat terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur telah mengalami peningkatan kemiskinan secara signifikan pada tahun 2019-2021. Beberapa Kabupaten/Kota yang terpilih telah mengalami peningkatan pada jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada akhir tahun. Hal ini ditunjukkan dengan membandingkan jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk pada akhir tahun di Kabupaten/ Kota tersebut. Berikut adalah data jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2021:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur (Jiwa)
	2021
Kabupaten Malang	2.668.296
Kabupaten Jember	2.550.360
Kabupaten Sidoarjo	2.091.930
Kabupaten Bangkalan	1.071.712
Kabupaten Sampang	976.020

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2022

Dari Tabel 1.1 dapat terlihat bahwa 5 Kabupaten/Kota yang terpilih telah mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin yang sangat tinggi pada akhir tahun 2020-2021. Terlihat pada data Kabupaten Malang yang telah mengalami peningkatan kemiskinan sebesar 12 ribu jiwa tepatnya pada tahun 2020-2021, dari angka 265 ribu menjadi 276 ribu jiwa penduduk miskin. Selanjutnya pada data Kabupaten Jember yang mengalami peningkatan sebesar 10 ribu jiwa penduduk miskin, ditunjukkan pada tahun 2020 sebesar 247 ribu jiwa menjadi 257 ribu jiwa di tahun 2021. Kemudian pada data Sidoarjo dimana pada tahun 2020 hanya 127 ribu jiwa penduduk miskin menjadi 137 ribu jiwa pada tahun 2021, hal ini mengalami peningkatan sebesar 10 ribu jiwa penduduk miskin. Untuk Kabupaten Bangkalan, pada tahun 2020 sebesar 204 ribu jiwa menjadi 215 ribu jiwa di tahun 2021 atau mengalami peningkatan sebesar 11 ribu jiwa penduduk miskin. Dan yang terakhir yaitu Kabupaten Sampang, dari tahun 2020 jumlah penduduk miskin 224 ribu jiwa meningkat sebesar 13 ribu jiwa di tahun 2021 menjadi 237 ribu jiwa. Hal inilah yang menjadi alasan lima kabupaten diatas yang akan diteliti pada periode 2011-2021.

Menurut Sartika, Faktor penyebab dari kemiskinan yaitu: Pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua,

kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia karena pendidikan yang dimiliki. Ketiga, kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.⁹

Dengan melihat kondisi kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab meningkatnya kemiskinan antara lain: (a) Aktifitas perekonomian masih belum pulih sebagai dampak pandemi covid-19. (b) Dalam upaya mematuhi anjuran pemerintah dalam rangka pencegahan perluasan covid-19, masyarakat di Jawa Timur masih banyak berdiam diri di rumah.¹⁰ Permasalahan lain disebabkan oleh beberapa faktor seperti jumlah upah yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan, kualitas hidup masyarakat yang cenderung rendah, produktivita tenaga kerja, terbatasnya lowongan atau lapangan pekerjaan sehingga banyak masyarakat yang menganggur dan tidak memiliki penghasilan. Selain itu, kemiskinan juga dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi wilayah dan juga inflasi. Sesuai dengan teori Kuncoro, bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi.¹¹ *Pertama*, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola sumberdaya yang menimbulkan ketimpangan (hal ini tercermin pada tingginya laju PDRB namun pemerintah tidak memperhatikan meratanya pembangunan ekonomi ke semua kalangan masyarakat). *Kedua*,

⁹ Sartika, C., Balaka, M. Y., & Rumbia, W. A, “Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna”. Jurnal Ekonomi UHO, 2016, Vol.1,No.1

¹⁰ Badan Pusat Statistik (BPS), “Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan Maret 2021 Kabupaten Tulungagung”, diakses pada tanggal 12 Oktober 2022 pada pukul 10.17

¹¹ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2003), hlm. 107

kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan kualitas sumber daya manusia yang ada (hal ini tercermin pada peningkatan IPM dan juga pengangguran, dimana jika IPM rendah maka produktifitasnya juga akan rendah), *Ketiga*, kemiskinan muncul karena perbedaan akses modal.

Dengan tingginya tingkat kemiskinan ini dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi, karena kondisi kemiskinan ternyata dapat menimbulkan beberapa dampak atau akibat seperti: banyaknya kasus putus sekolah, muncul berbagai masalah kesehatan di masyarakat, menurunnya kualitas generasi penerus, muncul tindakan kriminalitas dsb.¹² Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangatlah berperan penting dalam pembangunan perekonomian. IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya: (1) Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran, (2) Pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan (3) Standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik Bruto/PDB per kapita.¹³

IPM merupakan tanggapan UNDP (*United Nations Development Program*) terhadap tuntutan perlunya indikator yang mampu menggambarkan

¹² Siti Nur Aeni, "Katadara.co.id: Penyebab Kemiskinan dan Dampak yang Ditimbulkan", diakses pada tanggal 12 Oktober 2022 pada pukul 12.13

¹³ Yusniah Anggraini, *Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Indocamp, 2018), hlm. 8

sejauh mana suatu wilayah telah menggunakan sumberdaya penduduknya untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia negara atau wilayah tersebut. Menurut Romer bahwa *human capital* yang terdiri antara lain pendidikan, pelatihan, keterampilan, kecerdasan, dan kesehatan atau sering disebut dengan IPM merupakan sumber mendasar dari produktivitas ekonomi.¹⁴ Selain itu, teori IPM menurut Todaro dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan dapat diatasi dengan melalui peningkatan pembangunan modal manusia (*human capital*) untuk meningkatkan produktivitas manusia.¹⁵

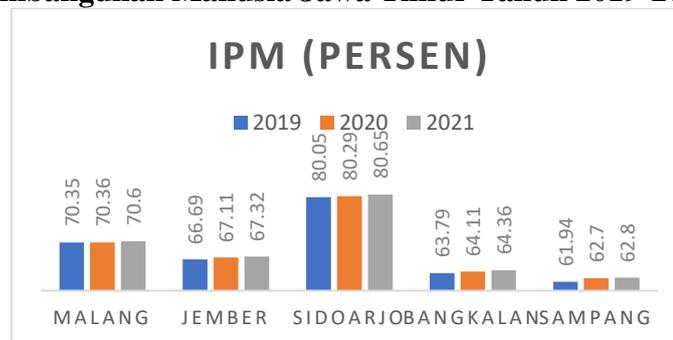
Isu yang kemudian berkembang adalah bahwa keberhasilan meningkatkan prestasi ekonomi suatu wilayah ke tingkat yang lebih tinggi tidak selalu diikuti oleh meningkatnya mutu kehidupan warga masyarakatnya. Dengan alasan itulah muncul pemikiran bahwa mutu kehidupan individu/perorangan menjadi prasyarat guna meningkatkan mutu kehidupan masyarakatnya. Apabila peningkatan mutu dapat dicapai diharapkan rasa aman dan damai menjadi kenyataan.¹⁶ Hal ini dikarenakan jika produktivitas tinggi, karena didukung oleh tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan dan juga kehidupan yang layak, nantinya akan memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaan dan mendapatkan pendapatan yang cukup sehingga akan terjauh dengan keadaan kemiskinan. Berikut adalah perkembangan dan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur yang diukur dengan IPM tahun 2011-2021:

¹⁴ Romer, P. M. 1991. *Human capital and growth: Theory and evidence*. Working Paper 3173, National Bureau of Economic Research, Cambridge, M.A

¹⁵ Michael P Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Kedelapan*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 69

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 19

Grafik 1.1
Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur Tahun 2019-2021 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2022

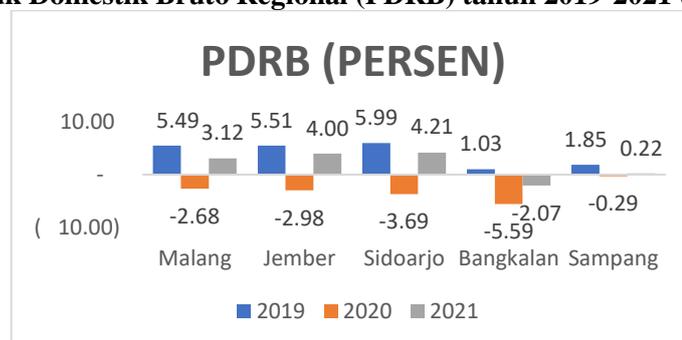
Dari Grafik 1.1 terlihat bahwa setiap kabupaten di atas, yaitu Kabupaten Malang, Jember, Sidoarjo, Bangkalan dan juga Sampang telah mengalami peningkatan yang signifikan di setiap tahunnya dari mulai tahun 2011-2021. Hal ini dapat diartikan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur telah mengalami pertumbuhan. Karena IPM sendiri merupakan indikator yang dapat menentukan level pembangunan suatu wilayah. Menurut teori Hardjanto, IPM menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia, aspek yang menjadi fokus perhatian adalah peningkatan standar pendidikan, derajat kesehatan, dan mutu ekonomi keluarga. Ketiga hal tersebut satu sama lain saling berkaitan. Dengan demikian dalam konteks pembangunan SDM, ketiga aspek tersebut harus diperhatikan secara utuh.¹⁷

Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB juga merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. PDRB digunakan sebagai indikator untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan

¹⁷ Imam Hardjanto, Teori Pembangunan (Malang: UB Press, 2013), hlm. 109

sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan yang salah satunya untuk mengurangi jumlah kemiskinan. Yang dimaksud dengan produk regional adalah produk domestik ditambah dengan pendapatan yang diterima dari luar daerah atau negeri dikurang dengan pendapatan yang dibayarkan ke luar daerah atau negeri tersebut. Jadi produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah.¹⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan besar pendapatan masyarakat daerah tersebut.¹⁹ Sesuai dengan keadaan yang ada dan sesuai dengan teori-teori yang disampaikan, hal inilah yang menjadi adanya hubungan antara PDRB dengan kemiskinan. Berikut adalah data perkembangan dan pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011-2021:

Grafik 1.2
Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) tahun 2019-2021 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2022

¹⁸ Badan Pusat Statistik, *Pedoman Praktis Perhitungan PDRB Kabupaten/Kota*, (Jakarta: Nario Sari, 2008), hlm. 14

¹⁹ Thamrin Simanjuntak, *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2001)

Dari Grafik 1.2 dapat terlihat bahwa PDRB di 5 Kabupaten Jawa Timur yaitu Kabupaten Malang, Jember, Sidoarjo, Bangkalan dan juga Sampang telah mengalami penurunan di tahun 2020. Namun pada tahun 2021 semua wilayah telah mengalami kenaikan yang tajam. Kenaikan angka PDRB disetiap tahunnya dapat diartikan sebagai tingginya angka produksi. Tingginya angka produksi dihubungkan kepada daya beli masyarakat yang tinggi. Dan hal ini tentu saja banyak muncul anggapan bahwa pada saat kenaikan PDRB maka wilayah tersebut semakin sejahtera. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Todaro yang menjelaskan bahwa PDRB adalah ukuran kemajuan pembangunan. Meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga pertumbuhan pendapatan termasuk tolak ukur kemajuan pembangunan merupakan tujuan dari pembangunan itu sendiri.²⁰

Selain faktor-faktor diatas, jumlah pengangguran juga dijadikan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan Kabupaten di Jawa Timur. Menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur.²¹ Hal ini sama dengan teori pengangguran yang disampaikan oleh Nanga, dimana pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara

²⁰ Todaro Micheal, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Alih Bahasa Aminuddin Dan Mursis* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 3

²¹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13

aktif tidak sedang mencari pekerjaan.²² Ini adalah masalah yang saat ini sedang diusahakan oleh pemerintah dimana jumlah penduduk kian meningkat akan tetapi tidak dibarengi dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan teori pengangguran menurut Adam Smith dan David Ricardo yang berpendapat bahwa meningkatnya pengangguran di suatu daerah dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka ketika penduduk yang banyak tanpa ada penyediaan lapangan pekerjaan yang banyak pula akan mengakibatkan pengangguran semakin banyak.²³

Tingkat pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Keterkaitan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan sangat erat karena semakin besar tingkat pengangguran maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan yang ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Achmad Slamet yaitu penyebab pengangguran terjadi karena beberapa hal, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja, pemutusan hubungan kerja serta kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja.²⁴ Pengangguran merupakan suatu permasalahan yang tergolong dalam masalah makro ekonomi yang dapat mempengaruhi manusia sehingga tergolong dalam permasalahan yang berat. Jika permasalahan pengangguran

²² Nanga, Muana. *Makroekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan. Edisi Perdana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 249

²³ Irwan dan M. Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan Edisi Keenam* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1996), hlm.88

²⁴ Achmad Slamet, dkk, *Data Base Pengangguran Berpendidikan Tinggi di Sulawesi Tenggara*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), hlm. 2

tidak segera diatasi, maka dapat berimbas sangat buruk pada perekonomian suatu wilayah tersebut. Berikut adalah data pertumbuhan pengangguran Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011-2021:

Grafik 1.3
Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019-2021
(Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2022

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, yang berarti Indonesia memiliki modal tenaga kerja yang melimpah namun juga memberikan tingkat kesempatan penduduk untuk menganggur menjadi tinggi jika tidak diiringi dengan pertumbuhan lapangan kerja. Dari Grafik 1.3 dapat terlihat bahwa setiap kabupaten telah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 setiap kabupaten tingkat pengangguran telah mengalami peningkatan yang cukup tinggi sampai tahun 2012. Pada tahun 2013 jumlah pengangguran kembali turun, namun pada tahun 2014-2017 Jawa Timur kembali mengalami peningkatan jumlah pengangguran. Pada tahun 2018-2019 pengangguran kembali turun, namun pada tahun 2020 jumlah pengangguran semakin tinggi.

Kebaruan dari penelitian ini dapat dilihat dari lokasi penelitian yang terpilih, karena memang sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang

kemiskinan, namun masing-masing daerah tentu memiliki karakteristik tersendiri terkait dengan tema tersebut. Baik dari penyebab terjadinya kemiskinan, siapa saja yang terlibat, hambatan yang dilalui dan fokus masalah yang dikaji. Dari penelitian-penelitian terdahulu, banyak penelitian yang hanya meneliti tentang indikator pendidikan, sedangkan penelitian ini menggunakan indikator IPM yang sudah mencakup pendidikan, kesehatan dan kelayakan hidup masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dalam periode 2011-2021 terjadi fenomena kenaikan IPM, PDRB per kapita yang mengalami fluktuasi, dan tingkat pengangguran terbuka yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jumlah pertumbuhan penduduk miskin Kabupaten/Kota di Jawa Timur juga mengalami kenaikan setiap tahunnya, padahal IPM-nya mengalami peningkatan dan PDRB per kapitan-nya masih mengalami fluktuasi. Penting untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara IPM, PDRB per kapita, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Maka dari itu penulis tertarik menuliskan tugas akhir skripsi dengan berjudul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Pada Tahun 2011-2021”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, telah diidentifikasi sejumlah masalah yang nantinya akan dipakai sebagai bahan

dari diadakannya sebuah penelitian ini. Adapun untuk identifikasi masalah penelitian ini, antara lain:

1. Permasalahan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2021 cenderung mengalami fluktuasi. Dari tahun 2011-2019 telah mengalami penurunan yang signifikan, namun mulai dari tahun 2019-2021 tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur kembali mengalami kenaikan yang sangat tinggi.
2. Peningkatan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Timur tidak diimbangi dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Karena secara teori jika IPM rendah kemungkinan dapat berakibat rendahnya produktivitas kerja dari penduduk, hal ini berakibat rendahnya pendapatan penduduk sehingga dapat mempengaruhi tingginya jumlah penduduk miskin.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Jawa Timur cenderung mengalami peningkatan yang signifikan. Seharusnya dengan peningkatan ini, Kabupaten/Kota di Jawa Timur seharusnya mengalami pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan PDRB berarti peningkatan pendapatan. Akan tetapi, jika dilihat dari data di atas kemiskinan tetap mengalami kenaikan yang cukup tinggi.
4. Banyaknya pengangguran pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur, terutama di 5 Kabupaten yang akan dianalisa. Perkembangan tingkat pengangguran di Jawa Timur cenderung mengalami fluktuasi, tepat pada tahun 2018-2021 rata-rata semua Kabupaten telah mengalami peningkatan yang tinggi. Dan di sini yang paling tinggi besar pengangguran di Jawa Timur yaitu

Kabupaten Sidoarjo yang meningkat sebesar 6% dibandingkan dengan Kabupaten lain yang hanya naik 1-3%.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh signifikan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2011-2021?
2. Bagaimana pengaruh signifikan PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2011-2021?
3. Bagaimana pengaruh signifikan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2011-2021?
4. Bagaimana pengaruh signifikan indeks pembangunan manusia, PDRB per kapita, dan pengangguran secara simultan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2011-2021?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh signifikan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2011-2021.

2. Untuk menguji pengaruh signifikan PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2011-2021.
3. Untuk menguji pengaruh signifikan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2011-2021.
4. Untuk menguji pengaruh signifikan indeks pembangunan manusia, PDRB per kapita, dan pengangguran secara simultan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2011-2021.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan untuk mengetahui penyebab besarnya jumlah penduduk miskin di Jawa Timur dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan bacaan, referensi maupun penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang tertarik pada penelitian tentang kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini membahas terkait tingkat kemiskinan yaitu dengan judul penelitian “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur” sehingga dalam penelitian ini terfokus untuk menganalisis terkait pengaruh dari tiga variabel bebas yaitu, X_1 (IPM), X_2 (PDRB), X_3 (Pengangguran), dan variabel terikat yaitu Y (Kemiskinan).

2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penulis memberikan batasan pada penelitian ini. Batasan pada penelitian ini antara lain:

- a. Penelitian ini menggunakan objek Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Sampang.
- b. Penelitian ini dengan periode yang diamati dari data Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2021. Keterbatasan waktu penelitian hanya terbatas sampai tahun 2021 dikarenakan pada tahun

2022 data belum bisa disajikan karenan rekapitulasi tahunan biasanya disajikan minimal 3 bulan awal tahun selanjutnya.

- c. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu IPM, PDRB, dan pengangguran dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Sedangkan sebenarnya banyak variabel lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Akan tetapi, penulis melihat bahwa indikator yang paling besar mempengaruhi terhadap penyebab dan solusi pengentasan kemiskinan adalah 3 variabel tersebut.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan serba kekurangan harta dan benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang yang hidup dalam lingkungan serba miskin atau kekurangan modal, baik dalam pengertian uang, pengetahuan maupun, kebutuhan sosial, politik, hukum maupun akses terhadap fasilitas pelayanan umum, kesempatan berusaha dan bekerja. Kemiskinan berarti suatu kondisi dimana orang atau sekelompok orang tidak mempunyai kemampuan, kebebasan, asset dan aksebilitas untuk kebutuhan mereka diwaktu yang akan datang, serta sangat rentan terhadap resiko dan tekanan yang

disebabkan oleh penyakit dan peningkatan secara tiba-tiba atas harga-harga bahan makanan dan uang sekolah.²⁵

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua Negara di seluruh dunia. Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari atas tiga aspek yaitu: 1.) Indeks Ekonomi (Pendapatan riil per kapita), 2.) Indeks Pendidikan (Angka melek huruf dan lama sekolah), 3.) Indeks Kesehatan (Umur harapan hidup waktu lahir). Indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara merupakan negara maju, negara berkembang, atau bahkan negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.²⁶

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah oleh seluruh unit usaha suatu daerah tertentu atau jumlah nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penghitungan PDRB berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan maupun PDRB atas dasar harga berlaku.

²⁵ Suparlan Parsudi, *Kemiskinan Perkotaan dan Alternatif Penanganannya* Ditujukan Dalam Seminar Forum Perkotaan, (Jakarta:Prasana Wilayah,2000), hlm.57

²⁶ Sarpina, et.al., "Tendensi Komparasi Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 2021, Vol. 16, No.1, 2021, hlm. 28-29

PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB Atas Harga Konstan juga digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh dari tahun ke tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku setiap tahun. PDRB atas harga berlaku digunakan untuk melihat setiap pergeseran dari struktur ekonomi.²⁷

d. Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Fator utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut akan diperoleh apabila pengusaha tersebut dapat menjual barang dan jasa yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan

²⁷ Rudi Hartono, et.al., "Pengaruh Produk Domestik Regional (PDRB) dan Upah Minimum Kota (UMK) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen, vol. 14, no. 1. 2018, hlm. 38-39

jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja.²⁸

2. Definisi Operasional

Berdasarkan judul dalam penelitian ini yaitu, “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pengangguran terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2021”, maka secara operasional peneliti memiliki maksud untuk melihat mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pengangguran terhadap Kemiskinan yang ada di 5 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2021. Lokasi yang terpilih adalah 5 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang. Kabupaten yang dijadikan sebagai lokasi penelitian dipilih sesuai dengan peningkatan kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan secara garis besar pada skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Dengan penjelasannya sebagai berikut:

²⁸ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.110

1. Bagian Awal

Pada bagian awal ini terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama ini terdiri dari VI (enam) bab dan dari masing-masing bab mempunyai subbab. Berikut penjelasannya:

Bab I pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) indentifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan masalah, (g) penegasan istilah, (h) sistematika skripsi.

Bab II landasan teori yang di dalamnya terdiri dari: (a) kajian teoritis tentang kemiskinan, IPM, PDRB dan Pengangguran, (b) penelitian terdahulu, (c) kerangka konseptual, (d) hipotesis penelitian.

Bab III metode penelitian yang di dalamnya terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel penelitian dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data, (e) teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian yang di dalamnya terdiri dari hasil penelitian yang mencakup deskripsi data dan pengujian hipotesis.

Bab V pembahasan yang di dalamnya terdiri dari: (a) pembahasan hasil penelitian

Bab IV penutup yang di dalamnya terdiri dari: (a) kesimpulan dan (b) saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini terdiri dari: (a) daftar Pustaka, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi, (d) daftar riwayat hidup.